TINJAUAN SINGKAT MENGENAI KEBIJAKAN PUBLIK, POLITIK, DAN TEKNIK

BRIEF REVIEW OF PUBLIC POLICIES, POLITICS, AND TECHNIQUES

Budi Kurniadi
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana
kurnia170765@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang terkait dengan Isu-isu publik merupakan objek kajian kebijakan publik baik pada tahap formulasi, implementasi dan evaluasi. Pada setiap dimensi kebijakan publik erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan memerintah (administrasi negara/ pemerintah/birokrasi) keputusan politik dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik yang diambil dtujukan untuk mempengaruhi kinerja aparatur , mengatur alokasi sumber daya publik, mengarahkan kegiatan masyarakat, melakukan pelayanan publik dan menjamin keamanan dan ketentraman untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan akumulasi dari berbagai kepentingan, sehingga pada tiaptahap dimensi kebijakan publik tidak terlepas dari politik dan teknik.

Kata kunci: Kebijakan,Politik dan Teknik

ABSTRACT

Problems related to public issues are the object of public policy studies both at the formulation, implementation and evaluation stages. In each dimension of public policy is closely related to the decision-making process carried out by institutions that have the authority to rule (state / government / bureaucratic administration) political decisions in the form of public policies that are aimed at influencing apparatus performance, regulating the allocation of public resources, directing community activities, conducting public services and ensuring security and peace to realize community welfare. Public policy is essentially an accumulation of various interests, so that at each stage the dimensions of public policy are inseparable from politics and technique.

***Keywords**: Policy, Politics and Technique*

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi dan *focus of interest* administrasi publik yang memiliki tujuan untuk memberikan arah serta menentukan ruang lingkup permasalahan dalam mengatasi isu-isu publik *(public affairs)* dan masalah-masalah pemerintahan *(governmental problems)*. Konsep kebijakan publik dalam

perkembangannya tidak terlepas dari dua kajian disiplin ilmu yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi dengan focus dan lokus yang berbeda. Sebagai ilmu, kebijakan publik memiliki fokus kajian mengenai proses perumusan kebijakan/pembuatan keputusan ,proses memilih, mengevaluasi informasi yang tersedia yang berkitan erat dengan tujuan *(goals)* administrasi publik dalam hal mengatur dan memecahkan *"public affairs"* serta melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan termasuk melakukan perbaikan-perbaikan fungsi organisasi dan manajemen, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Secara spesifik batasan konsep kebijakan menurut Turner dan Hulme (1997:58) adalah:" proses pengambilan keputusan oleh penguasa dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan". Begitu pula Dror's dalam Turner dan Hulme (1997:58) mengartikan kebijakan adalah suatu keputusan yang merupakan petaruhan yang tidak jelas untuk mencoba mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan situasi masa depan, sedangkan Kartasasmita (1997:44) memformulasikan bahwa kebijakan publik adalah produk administrasi negara sebagai alat untuk mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mengemban amanat untuk kepentingan publik.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik meliputi berbagai aktivitas penguasa yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaaan keputusan-keputusan politik untuk mengatur kepentingan publik dan ini juga termasuk apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah , seperti dikemukakan Dye (1992:2) *Public policy is whatever government choose to do or not to do*". Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa kebijakan publik meliputi apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Selanjutnya Hoogwood dan Gunn dalam Turner dan Hulme (1997:58) menyatakan bahwa kebijakan adalah :

1. Sebagai Label suatu Bidang Kegiatan
2. Sebagai ungkapan penjelasan Tujuan atau keadaan yang diinginkan
3. Sebuah Keputusan Pemerintah
4. Sebuah persetujuan resmi
5. Sebuah Hasil AhirSebuah proses

2. Kontribusi Kebijakan Publik dalam Pencapaian Tujuan Pemerintahan

Pada dasarnya kebijakan berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan diantaranya pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta terjaminnya keamanan individu masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan harus dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pemerintahan dan mampu menjawab berbagai tantangan pertumbuhan dan pembangunan,sehingga menuntut penerapan strategi seperti dikemukakan Lindenberg & Ramirez (1989) dalam Turner dan Hulme (1997:63) yaitu : "Rekonstruksi kegagalan sebelumnya dan pahami kebutuhan saat ini , evaluasi keberhasilan strategi ekonomi sebelumnya, masalah apa saja yang masih ada, menentukam tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek ,mengelola dengan baik pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam proses pembangunan dan melakukan evaluasi dan perbaikan organisasi, agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini dan kondisi akan datang".

Didalam memecahkan persoalan-persoalan dan kepentingan publik yang bersinergis dengan proses perubahan yang terencana, maka formulasi dan implementasi kebijakan publik tersebut ,tentulah memiliki keeratan dengan pembangunan,seperti dikemukakan Kartasasminta (1996;26) bahwa :"pembangunan adalah proses perubahan ke arah lebih baik, sedangkan

pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan masyarakat

3. Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang

Di negara-negara berkembang, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terfokus pada pembangunan dan pembangunan itulah yang selalu menjadi substansi pokok kebijakan publik. Ini berarti bahwa pemerintah di semua negara melalui kewenangannya dalam mengambil keputusanterus melakukan dan mengatur alokasi sumber daya publik, mengarahkan kegiatan masyarakat, melakukan pelayanan publik dan menjamin keamanan dan ketentraman untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kartasasmitha 1997;46)

Menurut Turner dan Hulme (1997;59-60) bahwa kebijakan yang baik dan pelaksaanaan yang efektif merupakan faktor utama dalam keberhasilan pembangunan suatu Negara. Sebagai gambaran efektivitas kebijakan publik dapat dilihat di delapan Negara Asia Timur dan Tenggara (Jepang, Hongkong, Korea, Singapura, Taiwan, Indonesia, Malaysia dan Thailand) pada periode 1965-1990) yang mengalami kemajuan luar biasa bahkan menurut World Bank 1993 menyebutkan negara-negara tersebut sebagai keajaiban Asia Timur dengan sebutan Negara Asia yang memiliki perekenomian yang berprestasi tinggi HPAE (*High Performance Asian Economic*). Di delapan Negara ini angka pertumbuhan ekenomi begitu cepat dan pembangunan di berbagai bidang menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dengan angka harapan hidup tahun 1960 adalah 56 tahun dan pada tahun 1990 menjadi 71 tahun, sementara angka kemiskinan struktural mengalami penurunan dari angka 58 % menjadi 17 % untuk periode yang sama.

Gambaran ini menurut World Bank disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang sangat kuat terutama dalam makro ekonomi sehingga inflasi dapat dipertahankan serendah- rendahnya dan nilai tukar dijaga agar tetap kompetitif,selain memberikan peluang dan keleluasaan sektor swasta. Di sektor swasta untuk berkembang. Kepercayaan masyarakat pada kebijakan sektor perbankan menjadi pendorong sehatnya system perbankan dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank dan secara otomatis dapat menggerakkan iklim investasi.

Kebijakan di bidang pertanian difokuskan pada upaya yang mendorong produktivitas hasil pertanian dengan tetap melakukan pengendalian harga jangan sampai terjadi penyimpangan. Apabila dicermati secara seksama , berbagai pengalaman yang terjadi di beberapa Negara mengenai kebijakan yang efektif dan dianggap berhasil belum tentu dapat diterapkan di negara lain,karena faktor lingkungan yang berbeda seperti kondisi geografis, keragaman budaya dan idiologi masyarakat di Negara itu. Berkaitan dengan pendapat tersebut dalam mencapai efektivitas kebijakan upaya analisis kelayakan secara interaktif antar dimensi proses implementasi kebijakan menjadi faktor penting seperti dikemukakan Thomas dan Grindle dalam Turner et.al (1997 :80) bahwa :"*"Analysis of implementation feasibility should thus become an essential part of policy analysis"*. Analisis kelayakan tersebut dapat digambarkan dalam model interaktif proses implementasi kebijakan sebagai berikut :

dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan".

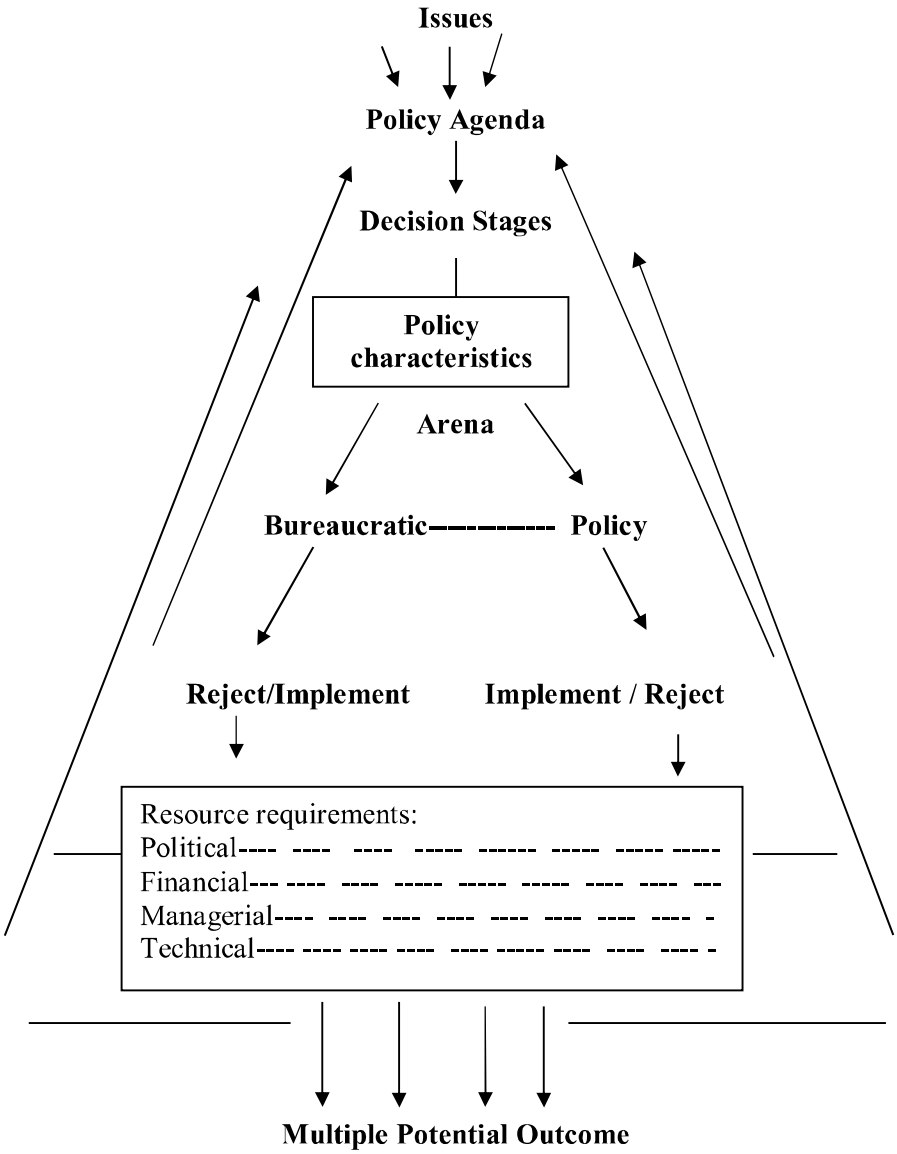

Gambar :3.1
The Interactive of Policy Implementation
Sumber : Thomas dan Grindle dalam Turner (1997:80)

4. Partisipasi dalam Proses Kebijakan Publik

Menurut Kartasasmita (1997:48-49) dikemukakanbahwa:"Di dalam prakteknya pembuat kebijakan mengidentifikasi tujuan dengan melibatkan berbagai fihak untuk memilih tujuan yang ditetapkan. Negara memberikan kewenangan kepada kelompok birokrat yang biasanya berbentuk badan-badan pemerintah untuk membuat kebijakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diurusinya.

Dalam mewujudkan *Good Governance* proses pembuatan kebijakan hendaknya melibatkan pihak-pihak berikut :a) Partai Politik, b) Birokrat; c) Non Government Organization (NGO); d) Masyarakat Sipil;

e) Karakter pembuat kebijakan (hakekat pimpinan).

5. Kebijakan, Politik,dan Pelaksanaan

Kebijakan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi kreatif yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" . Grindle (1980:8) mengembangkan model implementasi kebijakan berdasarkan *Content of policy* (isi kebijakan) dan *Context of implementation* (kondisi implementasi). Implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi digambarkan dalam bentuk skema seperti terlihat pada gambar 2.5.

Berdasarkan ilustrasi pada model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi Grindel (1980:9) menjelaskan bahwa *Content Of Policy* terdiri dari dimensi-dimensi :

(1) *Interest affected* (Kepentingan kebijakan);
(2) *Type of benefit* (Jenis manfaat yang dihasilkan);
(3) *Extent of change envisioned* (perubahan yang diharapkan);
(4) *Site of decision making* (areapengambilan keputusan);
(5) *Program implementorts* (Pelaksana program); dan
(6) *Resources commited* (Sumberdaya yang dikerahkan).

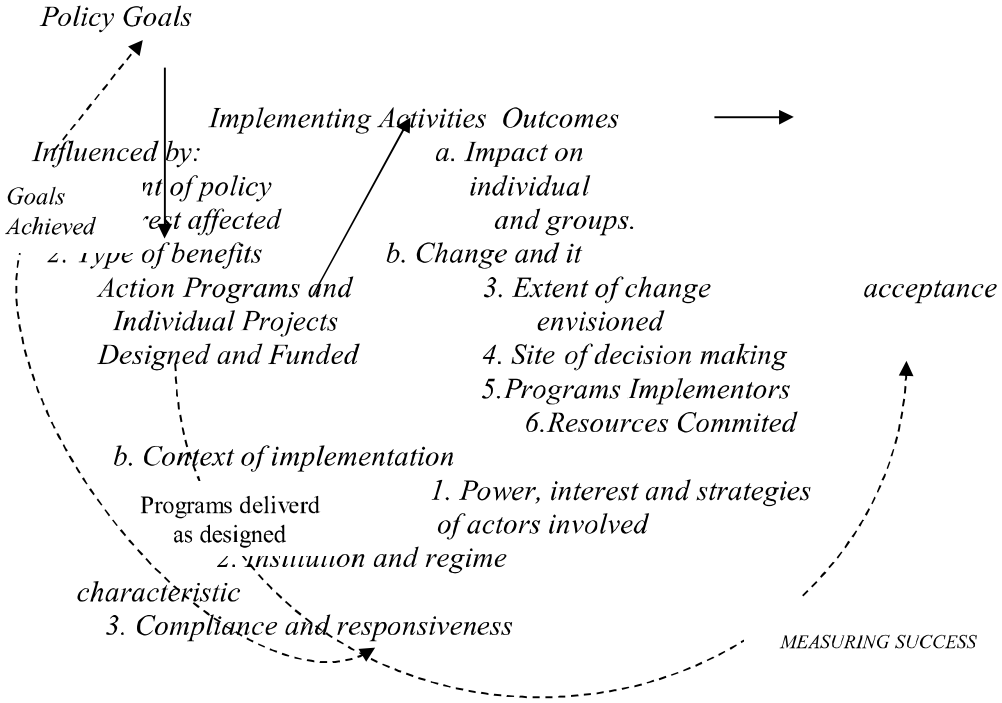

Gambar 5.1
Implementation as a Political and Administrative Process
Sumber: Grindle, (1980:11)

Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan *(content of policy)* tetapi pada dimensi *context of implementation* sarat dengan muatan politik, kepentingan , kelembagaan dan karakteristik penguasa ,walaupun demikian konten atau isi dari kebijakan

publik merupakan faktor yang penting dalam menentukan hasil dari kebijakan dan seringkali menjadi faktor yang kritis mengingat dampak yang ditimbulkan berada pada ranah sosial, politik dan ekonomi. Apa yang diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari kalkulasi kepentingan politik dan persaingan kelompok untuk sumber daya yang langka, respon dari pejabat pelaksana, dan tindakan elit politik yang berinteraksi dalam konteks kelembagaan. Untuk itu sudah selayaknya dalam menilai implementasi kebijakan juga mempertimbangkan kondisi atau keadaan lingkungan administratif dimana kebijakan berlangsung.

Sejalan dengan pendapat diatas, Gow dan Morse dalam Turner dan Hulme (1997 : 77) menegaskan sembilan masalah utama Pelaksanaan / Implementasi Kebijakan yang terdiri dari (1) Kendala Politik, Ekonomi dan Lingkungan,(2) Realitas Kelembagaan,(3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia,(4) Kekurangan Tenaga Ahli,(5) Desentralisasi dan Partisipasi,(6) Pemilihan Waktu,(7) Sistem Informasi,(8) Agenda terselubung / Perbedaan Agenda dan(9) Keberlangsungan manfaat proyek pembangunan.

6. Simpulan

1. Kebijakan publik adalah tindakan - tindakan atau keputusan - keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki implikasi terhadap publik dengan tujuan memecahkan masalah-masalah publik dan berdimensi kearah pembangunan yang lebih baik.
2. Kebijakan yang berhasil di suatu negara belum tentu efektif apabila diterapkan di negara lain karena pengaruh faktor lingkungan startegis seperti geografis, sosial-ekonomi, budaya, politik, nilai-nilai yang berbeda.
3. Dalam proses pelaksanaan kebijakan dimensi spesifikasi program, alokasi sumber daya dan keputusan merupakan dimensi yang sangat penting karena dimensi ini sangat erat kaitannya dengan peran birokrasi dan lembaga politik serta administrator sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksaan suatu program .

DAFTAR PUSTAKA

Grindle,S,Merilee. 1980. *Politics And Policy Implementation in The Third World*, New Jersey : Princeton University Press.

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. " *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan",*Jakarta: Pustaka CIDESINDO

Kartasasmita, Ginanjar .1997. "*Administrasi Pembangunan : perkembangan pemikiran dan praktiknya di Indonesia*.Jakarta:Pustaka LP3ES

Turner, Mark and Hulme, David .1997. " *Governance, Administration & Development : Making The State work, USA :* Maemillan Press ltd United Kingdom